

Kampung Nelayan Merah Putih sebagai Pilar Dukungan Keamanan Nasional: Analisis melalui *Maritime Security Matrix* Christian Bueger

Acacia Zeny Araminta Mourniaty^{1*}, Nefra Firdaus², Yuniar³, Harri Dolli Hutabarat⁴, Lukman Yudho⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Magister Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email : acaciazeny08@gmail.com^{1*}, nefra.firdaus@idu.ac.id², harri.dolli@idu.ac.id³, yuniar@idu.ac.id⁴, kamaledumplek@gmail.com⁵

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received : 30 August, 2026

Revised : 31 August 2026

Accepted : 6 September, 2026

Kata Kunci:

Ekonomi Biru;
Kampung Nelayan Merah Putih;
Keamanan Maritim;
Keamanan Nasional;
Indonesia.

ABSTRAK

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas ancaman keamanan maritim yang multidimensional. Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan intervensi strategis untuk mentransformasi desa pesisir menjadi kawasan produktif terintegrasi dari hulu hingga hilir. Artikel ini mengkaji kontribusi KNMP terhadap keamanan nasional melalui kerangka *maritime security matrix* Christian Bueger yang menempatkan keamanan maritim pada persinggungan empat dimensi: *national security*, *economic development* (*blue economy*), *marine environment*, dan *human security*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian literatur terstruktur yang dipadukan dengan analisis kerangka konseptual dan analisis kebijakan normatif. Berdasarkan studi kasus Samber-Binyeri, KNMP berasosiasi dengan indikator pada dimensi *economic development* dan *human security* melalui data sekunder yang melaporkan peningkatan produktivitas, nilai tambah, serta pendapatan nelayan skala kecil; sementara pada dimensi *national security*, program berpotensi memperkuat kehadiran negara dan fungsi pengawasan sipil nelayan di wilayah perbatasan dan alur laut strategis, dan pada dimensi *marine environment*, tata kelola terpadu berpotensi mendorong praktik penangkapan ikan terukur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Artikel mengusulkan kerangka integrasi empat dimensi sebagai rujukan penguatan tata kelola KNMP agar kontribusinya terhadap keamanan nasional menjadi lebih sistematis dan terukur. Keterbatasan terletak pada sifat konseptual-normatif sehingga validasi empiris pada lokasi KNMP tertentu diperlukan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.380 pulau (BIG, 2024), garis pantai sekitar 99.093 kilometer, dan wilayah laut yang mendominasi total wilayah negara (KKP, 2020). Kondisi geografis ini menjadikan laut sebagai ruang hidup, jalur komunikasi, sumber daya ekonomi, sekaligus area kontestasi kedaulatan. Lebih dari 80 persen volume perdagangan dunia diangkut melalui laut (Jumadil, 2025), selain itu,

sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang ketahanan pangan, lapangan kerja, serta identitas bangsa maritim (Alfi Maryati, 2025; Andriani, 2018). Namun, kompleksitas ancaman di ruang maritim, mulai dari pencurian ikan (*IUU fishing*), penyelundupan, pelanggaran kedaulatan di perbatasan, hingga kerentanan sosial ekonomi komunitas pesisir menuntut pendekatan keamanan yang tidak lagi bersifat tunggal dan militeristik semata (Listiyono et al., 2022; Dwiryanti, 2025; Sahary & Firdaus, 2026).

Keamanan maritim dipahami sebagai konsep multidimensional yang tidak identik dengan keamanan nasional. Dalam artikel ini keamanan nasional menjadi objek kebijakan (*referent*: negara), sedangkan keamanan maritim menjadi domain analitis tempat relasi antar-dimensi dipetakan. Dalam artikelnya, Bueger (2015a) menolak pemahaman keamanan maritim semata sebagai daftar ancaman (*laundry list*) dan menawarkan pendekatan *semiotic* yang memetakan relasi makna antara konsep keamanan maritim dengan konsep-konsep lain. Kerangka analitis berupa *maritime security matrix* menempatkan keamanan maritim pada persinggungan empat dimensi utama: *national security* (yang mencakup *seapower*, sengketa antarnegara, terorisme, dan proliferasi senjata), *economic development* atau *blue economy* (termasuk perikanan dan aktivitas ekonomi laut), *marine environment* (keselamatan laut, kecelakaan, dan pencemaran), serta *human security* (ketahanan komunitas, perdagangan manusia, dan dampak kejahatan laut terhadap individu). Matriks ini terus digunakan, dikembangkan, dan diadaptasi dalam kajian-kajian mutakhir. Bueger bersama Edmunds (Bueger & Edmunds, 2017; Bueger & Edmunds, 2019; Bueger & Edmunds, 2024) memperluas agenda kajian keamanan maritim dengan menekankan interkoneksi, liminalitas (persinggungan darat-laut), dan karakter lintas-yurisdiksi, serta menawarkan perangkat analisis dan *toolbox* solusi yang lebih komprehensif. Aplikasi matriks Bueger telah dilakukan dalam penilaian ancaman di kawasan Arktik serta analisis doktrin keamanan maritim negara-negara Indo-Pasifik, termasuk India dan Australia. Laporan UNIDIR *Securing the Seas* (Bueger, Edmunds, & Stockbruegger, 2024) menegaskan relevansi holistik keamanan maritim yang mengintegrasikan dimensi nasional, ekonomi, lingkungan, dan manusia dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk infrastruktur kritis, teknologi baru, dan perubahan iklim.

Di tingkat kebijakan nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai program prioritas strategis. Program ini bertujuan membangun dan menata kampung nelayan secara terpadu dari hulu hingga hilir, mencakup infrastruktur produksi (dermaga, tambat labuh, *docking* kapal), rantai dingin (*cold storage*, pabrik es), fasilitas pendukung ekonomi (kios, bengkel, sentra kuliner, tempat pelelangan ikan), serta penguatan kelembagaan melalui koperasi desa (Firmawan et al., 2026). Target awal mencakup puluhan hingga ratusan lokasi, dengan perluasan bertahap menuju ribuan kampung nelayan. Selain orientasi kesejahteraan, KNMP di sejumlah lokasi perbatasan seperti di Natuna dan pulau-pulau terluar secara eksplisit dikaitkan dengan penguatan kedaulatan dan fungsi nelayan sebagai “mata dan telinga” negara di laut.

Kesenjangan literatur yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian konseptual yang secara sistematis memetakan kontribusi KNMP terhadap keamanan nasional melalui kerangka matriks Bueger. Penelusuran terstruktur dilakukan pada *Google Scholar*, Scopus, SINTA, dan repositori resmi pemerintah (KKP, BIG, BPS) untuk periode 2015–Agustus 2026 dengan kombinasi kata kunci “Kampung Nelayan Merah Putih” atau “KNMP”, “*maritime security matrix*” atau “Bueger”, “*blue economy*” dan Indonesia, “keamanan maritim” dan (perbatasan atau pesisir), serta “*human security*” dan nelayan. Dari 142 dokumen yang teridentifikasi pada tahap awal (setelah penghapusan duplikasi),

setelah penyaringan judul/abstrak dan full-text (kriteria inklusi: fokus pada KNMP atau program pembangunan pesisir sejenis dan/atau aplikasi matriks Bueger; eksklusi: artikel non-akademik tanpa analisis konseptual), tidak ditemukan, dalam korpus yang dianalisis, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan program KNMP ke dalam empat dimensi *maritime security matrix* Bueger. Kajian yang ada umumnya berfokus pada aspek infrastruktur, kesejahteraan, atau implementasi program, sementara kajian keamanan maritim cenderung terpisah dari intervensi pembangunan pesisir. Artikel ini diarahkan oleh tiga pertanyaan penelitian: (RQ1) Bagaimana posisi dan kontribusi KNMP dipetakan ke dalam empat dimensi *maritime security matrix* Bueger (*national security, economic development/blue economy, marine environment, dan human security*)? (RQ2) Bagaimana interdependensi antar-dimensi memengaruhi potensi kontribusi KNMP terhadap keamanan nasional? (RQ3) Kerangka integrasi seperti apa yang dapat memperkuat tata kelola KNMP agar dampaknya terhadap keamanan nasional lebih sistematis dan terukur?

Tujuan artikel ini adalah memetakan posisi dan kontribusi KNMP dalam empat dimensi *maritime security matrix* Bueger, menganalisis interdependensi antar-dimensi, serta menyusun kerangka konseptual integrasi yang dapat menjadi rujukan penguatan tata kelola program agar dampaknya terhadap keamanan nasional menjadi lebih terukur dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian literatur terstruktur yang dipadukan dengan analisis kerangka konseptual dan analisis kebijakan normatif. Desain ini dipilih karena ketiga pertanyaan penelitian bersifat interpretatif: memetakan hubungan fungsional antara intervensi pembangunan pesisir (KNMP) dan kerangka keamanan maritim multidimensional, bukan menguji hipotesis kuantitatif berbasis data lapangan primer. Kajian literatur terstruktur dinilai lebih tepat dibanding tinjauan naratif karena menuntut string pencarian, kriteria inklusi/eksklusi, dan alur seleksi yang dapat direplikasi, sekaligus lebih sesuai dibanding tinjauan sistematis penuh atau tinjauan pelingkupan yang berorientasi pada penilaian efek intervensi atau pemetaan cakupan yang sangat luas (Grant & Booth, 2009).

Analisis kerangka konseptual digunakan untuk mengoperasionalkan matriks Bueger sebagai lensa pemetaan, mengikuti logika pembangunan kerangka dari konsep, literatur, dan relasi antar-konsep (Jabareen, 2009). Analisis kebijakan normatif menelaah isi dan arah dokumen resmi KNMP serta regulasi terkait, bukan mengukur implementasi di lapangan (Bacchi, 2009). Artikel ini secara eksplisit tidak mengklaim menghasilkan data empiris primer dari observasi lapangan atau survei; seluruh temuan bersumber dari sintesis dokumen kebijakan, literatur akademik, dan laporan resmi yang telah dipublikasikan.

Penelusuran literatur dilakukan secara terstruktur melalui dua kelompok sumber yang dibedakan fungsinya. Pertama, basis data akademik (*Google Scholar*, *Scopus*, dan *SINTA*) digunakan untuk mengidentifikasi artikel jurnal dan monograf. Kedua, portal resmi pemerintah (KKP, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik) serta repositori perguruan tinggi digunakan sebagai sumber literatur kelabu dan dokumen kebijakan. Pencarian terakhir dilakukan pada 15 Agustus 2026 untuk periode publikasi 2015–Agustus 2026. String pencarian utama meliputi kombinasi Boolean: (“Kampung Nelayan Merah Putih” atau “KNMP”), (“keamanan” atau “*maritime security*”, Bueger atau “*blue economy*” atau “*human security*”); serta string terpisah (“*maritime security matrix*” atau “Bueger matrix”) dan (Indonesia atau pesisir atau nelayan). Hasil unduhan dimasukkan ke manajer referensi Zotero. Duplikasi dihapus secara otomatis berdasarkan

DOI/judul/tahun, kemudian diperiksa manual oleh penulis pertama. Tahap identifikasi setelah deduplikasi menghasilkan 142 dokumen. Penyaringan dilakukan bertahap oleh penulis pertama dan dikonfirmasi penulis kedua. Perbedaan penilaian diselesaikan melalui diskusi hingga konsensus. Alur seleksi: (1) penyaringan judul dan abstrak menghasilkan 48 dokumen yang berpotensi relevan; (2) penilaian naskah lengkap terhadap 48 dokumen berdasarkan kriteria inklusi (membahas KNMP atau program pembangunan pesisir sejenis di Indonesia, dan/atau mengaplikasikan atau membahas matriks keamanan maritim Bueger) serta kriteria eksklusi (artikel non-akademik tanpa analisis konseptual, opini media tanpa data, publikasi di luar periode 2015–2026, atau tidak relevan dengan keamanan maritim multidimensional).

Dari 48 naskah lengkap, 26 dokumen dieksklusi (11 tidak membahas KNMP maupun kerangka Bueger secara substansial, 8 merupakan laporan berita/deskriptif tanpa analisis konseptual, 5 di luar cakupan geografis atau tematik, dan 2 tidak tersedia naskah lengkap). Akhirnya, 22 sumber digunakan untuk sintesis. Ringkasan alur: Identifikasi 142 → penyaringan judul/abstrak 48 → naskah lengkap dinilai 48 → eksklusi 26 → sumber dianalisis 22. Tidak ditemukan, dalam korpus yang dianalisis, kajian yang secara eksplisit memetakan program KNMP ke dalam empat dimensi matriks Bueger.

Hasil pemetaan 22 sumber diklasifikasikan ke dalam empat kategori irisan: (A) 10 sumber membahas KNMP atau pembangunan pesisir sejenis tanpa menggunakan matriks Bueger, umumnya berfokus pada infrastruktur, koperasi, pemasaran, dan kesejahteraan (Firmawan et al., 2026; KKP, 2025a; KKP, 2025b); (B) 8 sumber menerapkan atau membahas matriks/agenda Bueger tanpa menelaah KNMP (Bueger, 2015a, 2015b; Bueger & Edmunds, 2017, 2019, 2024; Bueger, Edmunds, & Stockbruegger, 2024; serta Bueger, 2015b sebagai perluasan tata kelola); (C) 4 sumber menyinggung KNMP atau komunitas nelayan dalam wacana kedaulatan, perbatasan, atau keamanan secara diskursif, tetapi tidak mengoperasionalkan keempat dimensi matriks Bueger secara sistematis (Sahary & Firdaus, 2026; Iriansyah, 2018); (D) 0 sumber, dalam korpus yang dianalisis, yang secara eksplisit mengintegrasikan program KNMP ke dalam keempat dimensi *national security, economic development/blue economy, marine environment, dan human security*.

Dengan demikian, kebaruan yang diklaim terbatas pada irisan eksplisit KNMP dan matriks Bueger dalam korpus 2015–Agustus 2026 yang ditelusuri; bukan ketiadaan literatur KNMP, bukan ketiadaan aplikasi Bueger di Indonesia, dan bukan tinjauan sistematis berprotokol lengkap. Kualitas sumber dinilai dengan kriteria appraisal sederhana (skor 0–2 pada setiap butir; ambang inklusi skor total ≥ 4): (1) kejelasan objek dan konteks; (2) kejelasan kerangka teoretis atau dasar hukum; (3) ketersediaan data atau argumen yang dapat ditelusuri; (4) relevansi terhadap salah satu atau lebih dimensi matriks Bueger. Dokumen kebijakan resmi diperlakukan sebagai sumber primer otoritatif untuk data program. Artikel jurnal diprioritaskan apabila terindeks Scopus atau SINTA. Laporan implementasi digunakan apabila dapat diverifikasi.

Sumber berita hanya dipakai sebagai pelengkap kontekstual dan tidak menjadi landasan klaim analitis utama. Analisis kebijakan normatif menelaah objek kebijakan berupa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023, serta siaran pers resmi KKP. Unit analisis adalah rumusan tujuan, instrumen, lokasi, dan indikator program. Teknik interpretasi bersifat isi-dokumen: mengidentifikasi ketentuan yang relevan, memetakannya ke empat kutub matriks, dan membedakan kontribusi aktual, indikatif, dan proposisional.

Analisis kerangka konseptual menempuh lima tahap yang dapat direplikasi (Jabareen, 2009): (1) pemetaan konsep inti matriks Bueger; (2) identifikasi titik kontribusi KNMP pada tiap dimensi; (3) penelusuran relasi dan interdependensi antar-dimensi; (4) penyusunan model integrasi; (5) perumusan implikasi tata kelola. Sebagai ilustrasi, artikel ini menggunakan studi kasus Kampung Nelayan Merah Putih Sumber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Pemilihan lokasi didasarkan pada empat kriteria: (1) status sebagai model percontohan nasional yang diresmikan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (2) ketersediaan data perubahan indikator yang relatif lengkap pada laporan resmi dan pemberitaan berbasis keterangan KKP; (3) representasi konteks Indonesia Timur dan komunitas Orang Asli Papua; serta (4) relevansi untuk menelaah dimensi economic development dan human security, sambil mengkaji potensi limpahan ke dimensi national security dan marine environment. Analisis tematik memetakan temuan ke empat dimensi matriks Bueger, kemudian disintesis menjadi kerangka integrasi.

Penyusunan kerangka mengikuti logika: pemetaan dimensi matriks; identifikasi titik kontribusi KNMP pada masing-masing dimensi; analisis interdependensi antar-dimensi; perumusan implikasi bagi tata kelola dan keamanan nasional. Karakteristik 21 sumber sintesis diringkas sebagai berikut. Kategori A (KNMP/pembangunan pesisir tanpa matriks Bueger): Firmawan et al. (2026), KKP (2025a), KKP (2025b). Kategori B (matriks/agenda Bueger tanpa KNMP): Bueger (2015a, 2015b), Bueger dan Edmunds (2017, 2019, 2024), Bueger, Edmunds, dan Stockbruegger (2024), serta pengembangan tata kelola pada Bueger (2015b). Kategori C (wacana kedaulatan/nelayan tanpa operasionalisasi empat dimensi): Sahary dan Firdaus (2026), Iriansyah (2018). Kategori D (integrasi eksplisit KNMP $\times$ empat dimensi): tidak ditemukan dalam korpus yang dianalisis. Seluruh sumber kategori A–C digunakan sebagai bahan sintesis; tidak satu pun memuat skor appraisal di bawah ambang inklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maritime Security Matrix Christian Bueger sebagai Kerangka Analisis

Bueger (2015a) menolak pemahaman keamanan maritim semata sebagai daftar ancaman (*laundry list*) dan menawarkan pendekatan semiotic yang memetakan relasi makna antara konsep keamanan maritim dengan konsep-konsep lain. Matriks yang dihasilkan menempatkan *maritime security* di pusat, dengan empat kutub: (1) *national security* yang berasosiasi dengan *seapower*, sengketa antarnegara, aksi teror, dan proliferasi senjata; (2) *economic development* yang berasosiasi dengan *blue economy* dan aktivitas perikanan; (3) *marine environment* yang berasosiasi dengan *marine safety*, kecelakaan, dan pencemaran; serta (4) *human security* yang berasosiasi dengan ketahanan (*resilience*) komunitas dan ancaman terhadap individu seperti perdagangan manusia. Ancaman spesifik seperti *IUU fishing*, perompakan, atau pencemaran dapat dipetakan pada persinggungan dimensi-dimensi tersebut (Bueger, 2015a; Bueger, 2015b). Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa matriks tersebut tetap menjadi rujukan utama, sekaligus diperkaya oleh agenda yang lebih luas. Bueger & Edmunds (2017, 2019) menekankan bahwa keamanan maritim bersifat *interlinked*, *transnational*, *liminal* (melibatkan darat dan laut), serta lintas-yurisdiksi institusional. Dalam *Understanding Maritime Security* (Bueger & Edmunds, 2024), kerangka analisis diperluas dengan perangkat hukum, perspektif *state-centric*, interpretasi makna dan praktik, serta analisis akar penyebab, sementara *toolbox* solusi mencakup tata kelola, strategi, berbagi informasi (*maritime domain awareness*), dan *capacity building*. Laporan UNIDIR *Securing the Seas* (Bueger, Edmunds, & Stockbruegger, 2024) menggarisbawahi integrasi dimensi keamanan nasional, ekonomi biru, lingkungan laut, dan human security

dalam menghadapi ancaman kontemporer, termasuk infrastruktur kritis dan dampak perubahan iklim. Aplikasi matriks pada konteks Arktik dan doktrin Indo-Pasifik menunjukkan daya adaptasinya di berbagai kawasan.

Batas konseptual dan hubungan hierarkis. Artikel ini membedakan secara tegas antara objek kebijakan, domain analitis, dan dimensi tetangga agar tidak terjadi *conceptual stretching*. Pertama, keamanan nasional (*national security*) adalah konsep *state-centric*: *referent object*-nya adalah negara kedaulatan, *survival*, *seapower*, sengketa antarnegara, terorisme, dan proliferasi senjata (Bueger, 2015a). Kedua, keamanan maritim (*maritime security*) bukan sinonim keamanan nasional, bukan payung yang menelan *blue economy*, *human security*, dan lingkungan, dan bukan sekadar daftar ancaman di laut. Mengikuti pendekatan *semiotic* Bueger, *maritime security* adalah medan relasional yang terletak pada persinggungan empat konsep tetangga; makna konsep itu baru terbaca dari relasinya, bukan dari definisi substansial tunggal. Ketiga, *economic development/blue economy*, *marine environment*, dan *human security* adalah dimensi tetangga, bukan *subspecies* keamanan nasional.

Peningkatan pendapatan nelayan, rantai dingin, atau koperasi tidak dengan sendirinya merupakan keamanan nasional; kelestarian stok ikan tidak dengan sendirinya merupakan keamanan maritim; ketahanan rumah tangga tidak dengan sendirinya merupakan *seapower*. Hierarki analitis artikel ini karena itu berlapis: (a) pertanyaan kebijakan yang dituju adalah potensi dukungan terhadap keamanan nasional Indonesia; (b) lensa pemetaan adalah *maritime security matrix*; (c) tiga dimensi non-negara berfungsi sebagai mediator atau syarat, bukan sebagai bukti langsung keamanan nasional. Konsekuensinya, KNMP diperlakukan sebagai intervensi pembangunan pesisir yang dapat berasosiasi dengan indikator pada masing-masing kutub matriks; klaim “pilar keamanan nasional” hanya sah apabila mekanisme termediasi (melalui *economic development* dan *human security*) serta syarat lingkungan dinyatakan secara eksplisit, dan tidak disamakan dengan temuan bahwa KNMP “adalah” keamanan nasional atau “adalah” keamanan maritim. Keunggulan matriks bagi analisis KNMP justru terletak pada pemisahan ini: program tidak direduksi menjadi isu kesejahteraan semata, tetapi juga tidak digelembungkan menjadi keamanan negara hanya karena berlangsung di pesisir.

Dimensi National Security: Kehadiran Negara dan Surveillance Sipil

Pada dimensi *national security*, KNMP berkontribusi melalui penguatan kehadiran fisik dan sosial negara di wilayah pesisir dan pulau-pulau, termasuk di kawasan perbatasan. Pembangunan infrastruktur terpadu di lokasi-lokasi strategis menciptakan titik-titik aktivitas ekonomi yang sekaligus menjadi titik pengawasan informal. Hubungan antara kesejahteraan nelayan dan fungsi *surveillance sipil* pada dasarnya masih bersifat argumentatif-teoretis dan belum dibuktikan secara kausal oleh evaluasi dampak primer terhadap KNMP. Namun, terdapat landasan kelembagaan dan empiris pendukung di tingkat kebijakan dan praktik pengawasan perikanan. Dalam wacana kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, nelayan kerap digambarkan sebagai “mata dan telinga negara” di laut, khususnya di kawasan perbatasan. Secara formal, pemerintah telah membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berdasarkan kerangka hukum perikanan sebagai saluran partisipasi masyarakat pesisir termasuk nelayan dalam memantau dan melaporkan praktik IUU fishing serta pelanggaran di wilayahnya (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001; Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5 Tahun 2021).

Kajian pengawasan perikanan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa POKMASWAS dapat memperkuat pelaporan pelanggaran apabila didukung organisasi,

insentif, dan saluran komunikasi yang jelas (SEAFDEC, 2024). Dengan demikian, yang dapat diklaim saat ini adalah potensi fungsi surveillance sipil yakni bahwa KNMP, melalui penguatan koperasi, infrastruktur pendaratan, dan keterikatan dengan kelembagaan formal (termasuk potensi sinergi dengan POKMASWAS, PSDKP, atau aparat terkait), dapat memperkuat kapasitas dan insentif nelayan untuk berperan dalam pengawasan partisipatif. Peningkatan surveillance yang terbukti (misalnya kenaikan frekuensi atau kualitas laporan aktivitas mencurigakan yang dapat diatribusikan kepada intervensi KNMP) belum tersedia dalam data yang dianalisis. Oleh karena itu, indikator seperti jumlah laporan ke PSDKP/Bakamla/TNI AL, integrasi saluran pelaporan, atau keaktifan POKMASWAS di lokasi KNMP harus dibaca sebagai indikator pemantauan yang diusulkan untuk menguji potensi tersebut di masa depan, bukan sebagai bukti bahwa surveillance telah meningkat.

Di kawasan seperti Natuna dan pulau terluar lainnya, pembangunan KNMP tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan geopolitik dan kedaulatan (Nasruddin et al., 2013; Iriansyah, 2018). Kehadiran komunitas nelayan yang produktif, terorganisasi, dan terhubung dengan kelembagaan formal dapat dibaca sebagai bentuk *effective occupation* dan *continuous presence* sipil yang melengkapi kehadiran kapal perang dan pos penjagaan. Indikator empiris yang dapat digunakan untuk mengoperasionalkan konsep ini antara lain: (a) intensitas aktivitas penangkapan dan pendaratan yang terdokumentasi di lokasi strategis/perbatasan; (b) keberadaan dan keaktifan koperasi atau kelompok nelayan yang terdaftar; (c) frekuensi pelaporan aktivitas mencurigakan kepada PSDKP/Bakamla/TNI AL; serta (d) integrasi komunitas ke dalam skema pengawasan partisipatif seperti POKMASWAS. Dengan indikator tersebut, peran komunitas nelayan dalam mendukung kedaulatan tidak lagi bersifat metaforis semata, melainkan dapat dipantau dan dievaluasi. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa *national security* di ranah maritim tidak hanya bergantung pada *seapower* militer, tetapi juga pada kapasitas negara untuk mengintegrasikan aktor sipil dalam sistem pengawasan domain maritim.

Dimensi *Economic Development* / *Blue Economy*

Dimensi *economic development* dalam matriks Bueger mencakup *blue economy* dan aktivitas perikanan. Menurut dokumen dan pernyataan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, KNMP merupakan program prioritas yang dirancang untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan produktif terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui pembangunan sarana prasarana produksi (dermaga, *cold storage*, pabrik es, bengkel, kios perbekalan, sentra kuliner, dan sejenisnya), penguatan kelembagaan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta pendampingan sosial ekonomi dengan tujuan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (KKP, 2025a, 2025b, 2025c). Menteri Kelautan dan Perikanan serta jajaran KKP secara berulang menempatkan KNMP dalam kerangka implementasi kebijakan ekonomi biru dan sebagai motor pertumbuhan ekonomi pesisir. Dengan demikian, KNMP dapat dibaca sebagai intervensi *blue economy* di tingkat komunitas, meskipun terminologi "*blue economy*" tidak selalu muncul sebagai label formal tunggal dalam setiap dokumen teknis program. Fasilitas yang dibangun bertujuan memperpendek rantai pasok, menjaga mutu hasil tangkapan, meningkatkan nilai tambah, dan membuka peluang usaha non-penangkapan bagi rumah tangga pesisir. Pengelolaan melalui koperasi desa (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) dimaksudkan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi tertahan di tingkat komunitas, bukan hanya dinikmati perantara (Wildani, 2026).

Data implementasi awal pada lokasi percontohan Samber-Binyeri menunjukkan pengiriman hasil perikanan sebesar 183,27 ton dengan nilai transaksi Rp3,15 miliar, serta

pengoperasian unit usaha berbasis fasilitas yang dibangun (Antara, 2025; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025d). Kontribusi terhadap keamanan nasional pada dimensi ini diajukan sebagai proposisi konseptual, bukan temuan empiris: secara teoretis, komunitas yang ekonominya stabil diasumsikan memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap rekrutmen oleh jaringan kejahatan, lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam praktik penangkapan ilegal yang merusak, dan lebih mampu menjadi mitra negara dalam menjaga ketertiban di ruang laut sekitarnya. Data dan dokumen yang dianalisis dalam artikel ini tidak memuat bukti empiris langsung yang menghubungkan peningkatan pendapatan pada KNMP dengan penurunan rekrutmen ke jaringan kejahatan atau penyelundupan; hubungan tersebut mengikuti logika nexus kesejahteraan–kerentanan dalam kajian human security dan keamanan ekonomi (Buzan et al., 1998; UNDP, 1994; Collier, 2007) dan masih memerlukan pengujian empiris pada lokasi program. Dengan kata lain, klaim bahwa blue economy yang inklusif menjadi fondasi soft security bersifat konseptual dan hipotetis pada tahap analisis ini.

Dimensi *Marine Environment*

Dimensi marine environment mencakup marine safety, pencegahan kecelakaan, dan pengendalian pencemaran. Untuk menghindari mencampuradukkan asumsi dengan temuan, kontribusi KNMP pada dimensi ini dibedakan menjadi actual contribution dan potential contribution. Berdasarkan data dan dokumen yang dianalisis, kontribusi aktual yang dapat dicatat bersifat terbatas dan tidak langsung: (1) adanya fasilitas pendaratan dan rantai dingin yang tertata menciptakan prasyarat teknis bagi pencatatan hasil tangkapan yang lebih terpusat; (2) desain program secara resmi menekankan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam sejumlah pernyataan KKP, meskipun indikator lingkungan spesifik belum menjadi komponen inti evaluasi dampak yang dipublikasikan. Tidak ditemukan dalam sumber yang disintesis bukti empiris primer bahwa KNMP telah menurunkan tingkat pencemaran, mengurangi kecelakaan operasional secara terukur, atau menghasilkan kepatuhan penangkapan berkelanjutan yang terverifikasi di lokasi program.

Tata kelola terpadu yang diusung berpotensi mendukung praktik penangkapan ikan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023) serta pengawasan terhadap praktik yang merusak, apabila sentralisasi pendaratan diintegrasikan dengan sistem kuota dan data pendaratan yang akurat sesuai kerangka kebijakan tersebut. Penangkapan ikan terukur didefinisikan sebagai penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Infrastruktur yang lebih baik juga berpotensi mengurangi risiko kecelakaan operasional di area bongkar-muat tradisional yang semrawut. Namun, tanpa integrasi eksplisit indikator lingkungan dan praktik penangkapan ikan terukur ke dalam desain serta evaluasi KNMP, terdapat risiko bahwa peningkatan kapasitas penangkapan justru menekan stok ikan atau memperburuk tekanan ekologis di wilayah tertentu. Oleh karena itu, dalam kerangka matriks Bueger, kontribusi KNMP pada dimensi marine environment hingga saat ini terutama bersifat potensial dan kondisional tergantung pada seberapa jauh program diintegrasikan dengan kebijakan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, kebijakan penangkapan ikan terukur, dan pengawasan lingkungan dan tidak disajikan sebagai hasil empiris yang telah terbukti.

Dimensi *Human Security*

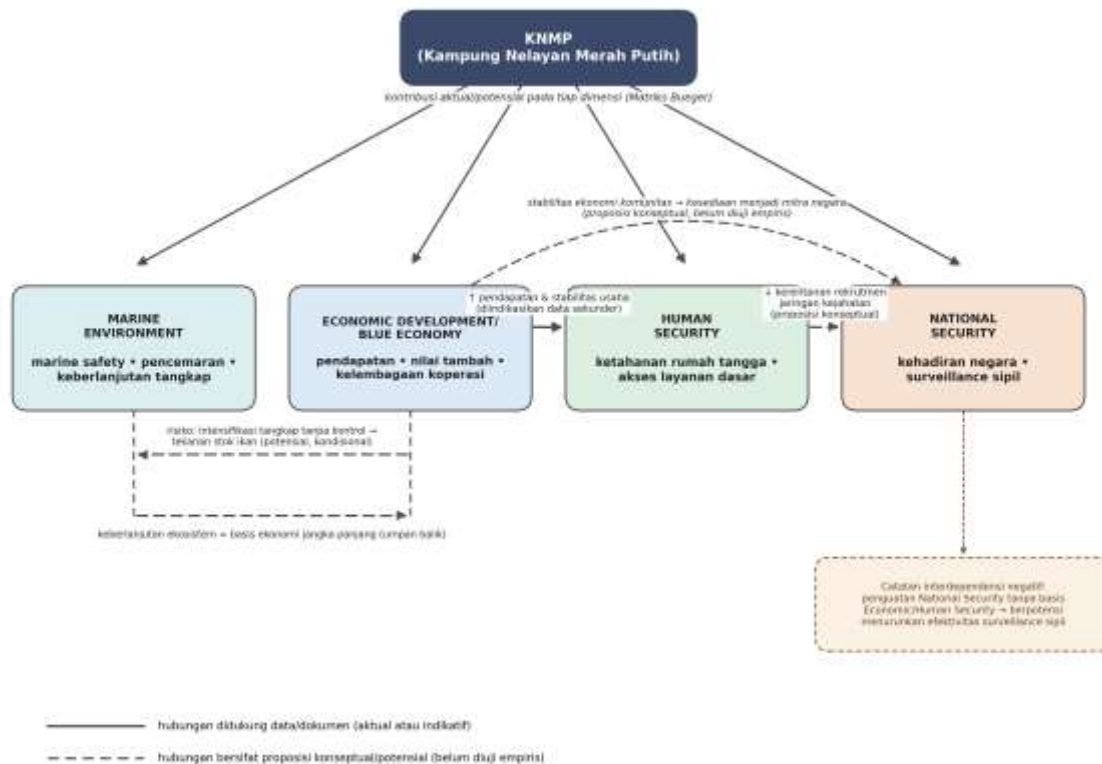
Human security menempatkan individu dan komunitas sebagai referensi keamanan, bukan hanya negara. Bagi komunitas nelayan, ancaman *human security* mencakup kemiskinan struktural, kerentanan terhadap cuaca ekstrem dan kecelakaan laut, akses terbatas terhadap layanan dasar, serta paparan terhadap praktik eksploitasi dalam rantai nilai perikanan. KNMP secara langsung menysasar akar kerentanan ini melalui peningkatan infrastruktur, akses terhadap fasilitas produksi dan pemasaran, serta penguatan kelembagaan koperasi yang dapat menjadi saluran perlindungan kolektif.

Peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha nelayan skala kecil berkontribusi pada ketahanan (*resilience*) rumah tangga pesisir. Ketahanan ini, dalam logika matriks Bueger, secara konseptual diasumsikan mengurangi kerentanan komunitas terhadap ancaman yang berada di persinggungan *human security* dan *national security* misalnya rekrutmen oleh jaringan penyelundupan atau keterlibatan dalam aktivitas ilegal karena desakan ekonomi. Perlu ditegaskan bahwa hubungan sebab-akibat ini belum diverifikasi dengan data empiris pada kasus KNMP; klaim tersebut merupakan proposisi teoretis yang diturunkan dari literatur *human security* (UNDP, 1994; Gasper, 2005), bukan hasil pengukuran langsung terhadap penurunan rekrutmen atau keterlibatan dalam jaringan ilegal. Dengan demikian, investasi pada *human security* melalui KNMP diargumentasikan bukan dibuktikan sebagai investasi pada stabilitas keamanan yang lebih luas.

Interdependensi Dimensi dan Kerangka Integrasi

Kekuatan analitis matriks Bueger terletak pada penekanan interdependensi. Peningkatan pada satu dimensi dapat memperkuat atau, jika tidak dikelola, melemahkan dimensi lain. Sebagai contoh, keberhasilan dimensi *economic development* tanpa perhatian pada *marine environment* dapat menghasilkan *overfishing* yang pada jangka panjang merusak basis ekonomi itu sendiri dan meningkatkan kerentanan *human security*. Sebaliknya, penguatan *national security* semata melalui pendekatan militer tanpa penguatan ekonomi dan *human security* komunitas pesisir dapat menciptakan jarak antara negara dan masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas *surveillance* sipil.

Untuk memperjelas mekanisme hubungan antarvariabel yang selama ini dijelaskan secara naratif, Gambar 1 menyajikan model konseptual yang menunjukkan arah hubungan yang diusulkan antara KNMP dan keempat dimensi *Maritime Security Matrix* Bueger, termasuk interdependensi antar-dimensi.



Gambar 1. Model Konseptual Interdependensi KNMP dan Empat Dimensi Matriks Bueger

Keterangan: garis penuh menandakan hubungan yang didukung data/dokumen program (aktual atau indikatif); garis putus-putus menandakan hubungan yang bersifat proposisi konseptual atau potensial dan belum diuji secara empiris pada lokasi KNMP. Model ini menegaskan bahwa kontribusi KNMP terhadap national security bersifat termediasi (melalui economic development dan human security) serta bersyarat pada pengelolaan risiko pada dimensi marine environment, bukan merupakan hubungan langsung yang otomatis.

Berdasarkan Gambar 1. Penelitian ini menempatkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai titik masuk untuk membaca bagaimana intervensi pemberdayaan nelayan berkontribusi, secara aktual maupun potensial, pada empat dimensi *Maritime Security Matrix* Bueger. KNMP tidak diperlakukan sebagai program sektoral semata, melainkan sebagai simpul yang merentang ke lingkungan laut, pembangunan ekonomi biru, keamanan manusia, dan keamanan nasional. Pada dimensi lingkungan, program ini dikaitkan dengan keselamatan laut, pengendalian pencemaran, dan keberlanjutan tangkap; pada dimensi ekonomi, dengan pendapatan, nilai tambah, dan kelembagaan koperasi; pada dimensi keamanan manusia, dengan ketahanan rumah tangga dan akses layanan dasar; serta pada dimensi keamanan nasional, dengan kehadiran negara dan surveillance sipil di komunitas pesisir.

Alur kausal yang paling tertambat pada data berjalan dari ekonomi ke keamanan manusia. Kenaikan pendapatan dan stabilitas usaha, yang diindikasikan oleh data sekunder, dipandang memperkuat ketahanan rumah tangga sehingga ruang kerentanan sosial menyempit. Dari situ ditarik proposisi konseptual bahwa berkurangnya kerentanan rekrutmen ke jaringan kejahatan dapat menopang keamanan nasional, sementara stabilitas ekonomi komunitas diharapkan menumbuhkan kesediaan warga menjadi mitra negara. Hubungan terakhir ini masih berupa busur potensial yang belum diuji empiris, sehingga penelitian membedakan secara tegas temuan yang didukung dokumen dari hipotesis yang menunggu verifikasi lapangan.

Di sisi lain, dimensi lingkungan dan ekonomi biru diikat oleh umpan balik dua arah yang bersifat kondisional. Keberlanjutan ekosistem diposisikan sebagai basis ekonomi

jangka panjang, tetapi intensifikasi tangkap tanpa kontrol berisiko menekan stok ikan dan pada gilirannya menggerus fondasi ekonomi biru itu sendiri. Penelitian juga mencatat interdependensi negatif: penguatan keamanan nasional yang tidak bertumpu pada keamanan ekonomi dan manusia berpotensi menurunkan efektivitas surveillance sipil, karena kehadiran negara yang tidak disertai perbaikan nafkah dan layanan dasar cenderung melemahkan legitimasi pengawasan di tingkat kampung. Dengan pemilahan garis hubungan yang didukung data dan yang masih konseptual, kerangka ini digunakan untuk menjelaskan mekanisme dampak KNMP terhadap ekonomi biru sekaligus memetakan di mana klaim geopolitik dan keamanan maritim masih memerlukan bukti empiris. Berdasarkan sintesis di atas, artikel ini mengusulkan kerangka integrasi empat dimensi untuk KNMP sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Integrasi KNMP dalam Maritime Security Matrix Bueger

Dimensi Matriks	Kontribusi KNMP	Indikator yang Diusulkan (Belum Diukur dalam Penelitian Ini)
Keamanan nasional (<i>national security</i>)	Kehadiran negara di pesisir dan perbatasan; fungsi pengawasan sipil nelayan; kehadiran sipil berkelanjutan / pendudukan efektif sipil	Jumlah laporan aktivitas mencurigakan; integrasi saluran pelaporan dengan PSDKP/TNI AL/Bakamla; keaktifan POKMASWAS; lokasi di pulau terluar
Pembangunan ekonomi (<i>blue economy</i>)	Infrastruktur rantai dingin dan produksi; peningkatan nilai tambah; unit usaha koperasi; penyerapan tenaga kerja lokal	Volume dan nilai produksi; omzet unit usaha; jumlah anggota koperasi aktif; diversifikasi usaha non-tangkap
Lingkungan laut (<i>marine environment</i>)	Aktual terbatas (prasyarat pencatatan); potensi: penangkapan ikan terukur (PP 11/2023) dan pengurangan risiko operasional (belum terbukti empiris)	Integrasi dengan sistem kuota/penangkapan ikan terukur (PP 11/2023; Permen KP 28/2023); indikator kepatuhan lingkungan; data pendaratan akurat
Keamanan manusia (<i>human security</i>)	Peningkatan pendapatan dan ketahanan rumah tangga; akses fasilitas produksi; perlindungan kolektif melalui koperasi	Perubahan pendapatan riil; akses layanan dasar; tingkat partisipasi dalam kelembagaan; persepsi keamanan komunitas

Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan sintesis matriks Bueger (2015a, 2015b; Bueger & Edmunds, 2024) dan dokumen kebijakan KNMP, yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I (KKP, 2025a), Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KKP, 2025b), serta siaran pers dan publikasi resmi KKP mengenai desain dan implementasi program (KKP, 2025c). Catatan: seluruh butir pada kolom “Indikator yang Diusulkan” bersifat rancangan untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi ke depan; butir-butir tersebut belum diukur, dikumpulkan, atau dianalisis sebagai data empiris dalam penelitian ini dan tidak boleh dibaca sebagai hasil temuan.

Studi Kasus: Kampung Nelayan Merah Putih Samber-Binyeri, Biak Numfor

Seluruh angka dan perubahan indikator yang dilaporkan dalam studi kasus ini bersifat data sekunder yang bersumber dari laporan dan keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta publikasi terkait yang dapat diverifikasi; artikel ini tidak melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Kampung Samber-Binyeri di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, Papua, merupakan model percontohan nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Sebelum intervensi, desa ini merupakan kampung nelayan tradisional dengan fasilitas sangat terbatas: tanpa dermaga kapal yang memadai, tanpa cold storage, dan tanpa fasilitas docking. Masyarakat bergantung pada praktik penangkapan tradisional dan pemasaran lokal yang terbatas. Melalui investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar sekitar Rp22,1 miliar (data sekunder dari

keterangan resmi KKP), kawasan tersebut ditransformasi menjadi kampung nelayan modern yang diresmikan pada 23 November 2023. Fasilitas yang dibangun meliputi dermaga tambatan kapal, pabrik es, cold storage, pangkalan pendaratan ikan, sentra kuliner, kios perbekalan, bengkel nelayan, dan dockyard.

Kampung ini dihuni sekitar 160 nelayan yang mengoperasikan 12 sampan dan 93 perahu motor, dengan komoditas utama tuna, cakalang, dan tongkol; rata-rata hasil tangkapan mencapai 100–200 kg per perahu per hari (Antara, 2025). Pengelolaan aset dilakukan oleh Koperasi Produsen/Desa Samber Binyeri Maju, yang menjadi wadah penampungan, pengolahan, dan pemasaran hasil tangkapan. Koperasi telah menjalin kemitraan dengan offtaker dan secara rutin mengirimkan hasil perikanan ke Pulau Jawa, dengan volume kumulatif 183,27 ton dan nilai transaksi Rp3,15 miliar (Antara, 2025).

Data perubahan indikator yang dilaporkan (Antara, 2025; merujuk keterangan KKP) menunjukkan bahwa pendapatan bulanan nelayan dilaporkan meningkat dari sekitar Rp3 juta menjadi Rp6 juta setelah peresmian pada 23 November 2023; angka produktivitas 5,35 ton menjadi 10,85 ton dan intensitas melaut 9 menjadi 13 hari per bulan yang beredar pada publikasi turunan diperlakukan sebagai data sekunder yang masih perlu verifikasi dokumen primer KKP. Nilai tambah ekonomi lokal juga dilaporkan meningkat. Angka-angka tersebut tidak dihasilkan dari pengumpulan data primer oleh penulis, melainkan diolah dan disintesis dari sumber sekunder yang tersedia. Karena artikel ini tidak menerapkan desain evaluasi dampak sebelum–sesudah yang terkontrol, hubungan antara intervensi KNMP dan perubahan indikator tersebut bersifat asosiatif dan tidak diklaim sebagai hubungan kausal yang telah teruji secara empiris. Samber-Binyeri kemudian dijadikan rujukan replikasi KNMP di berbagai wilayah Indonesia, termasuk usulan pengembangan di kabupaten lain di Papua.

Analisis melalui *Maritime Security Matrix* Bueger

Penerapan matriks Bueger pada kasus Samber-Binyeri memperlihatkan kontribusi berlapis. Pada dimensi *economic development/blue economy*, infrastruktur rantai dingin dan kelembagaan koperasi berasosiasi dengan indikator produktivitas, kualitas, akses pasar, dan pendapatan yang dilaporkan meningkat sejalan dengan logika *blue economy* inklusif di tingkat komunitas. Pada dimensi *human security*, indikator pendapatan, stabilitas usaha, dan keterikatan dengan koperasi yang dilaporkan meningkat dapat dibaca sebagai penguatan ketahanan rumah tangga nelayan Orang Asli Papua, pengurangan kerentanan struktural, dan perluasan pilihan penghidupan (termasuk unit usaha non-penangkapan seperti sentra kuliner dan jasa pendukung).

Pada dimensi *national security*, meskipun Biak Numfor bukan kawasan perbatasan terluar seperti Natuna, kehadiran komunitas nelayan yang produktif, tertata, dan terhubung dengan kelembagaan formal secara konseptual dapat mendukung kehadiran negara di wilayah timur Indonesia. Nelayan yang sejahtera dan terorganisasi lebih berpeluang menjadi mitra dalam pengawasan domain maritim lokal, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta penegakan praktik penangkapan yang tertib. Pada dimensi *marine environment*, sentralisasi pendaratan dan pencatatan melalui fasilitas KNMP berpotensi mendukung pengelolaan yang lebih terukur. Namun, data sekunder yang tersedia untuk Samber-Binyeri tidak mencakup indikator konkret kualitas lingkungan, status stok ikan, bycatch, tingkat pencemaran, kepatuhan terhadap aturan penangkapan, atau metrik keberlanjutan ekosistem. Ketidadaan data tersebut merupakan keterbatasan penting: kontribusi KNMP pada dimensi *marine environment* di lokasi ini tidak dapat dinilai secara empiris dalam artikel ini dan harus diperlakukan sebagai *research limitation* serta agenda penelitian lanjutan.

Secara keseluruhan, studi kasus Samber-Binyeri, berdasarkan data sekunder yang tersedia, mengindikasikan bahwa desain KNMP yang terintegrasi dari hulu ke hilir berasosiasi dengan indikator positif pada beberapa dimensi matriks Bueger, khususnya *economic development* dan *human security*, serta mendukung argumentasi konseptual mengenai potensi penguatan *national security* melalui stabilitas sosial-ekonomi dan kehadiran kelembagaan. Replikasi model ini ke lokasi lain, terutama kawasan perbatasan, perlu disertai integrasi *eksplisit* indikator keempat dimensi agar kontribusi terhadap keamanan nasional tidak hanya diasumsikan, tetapi diukur dan dikelola secara sistematis.

Implikasi bagi Tata Kelola dan Keamanan Nasional

Status seluruh butir di bawah ini adalah rekomendasi konseptual-normatif, bukan temuan empiris mengenai fragmentasi kelembagaan di lokasi KNMP. Artikel ini tidak mengumpulkan data primer tentang tumpang-tindih mandat, frekuensi rapat lintas lembaga, atau kegagalan koordinasi operasional KKP–Kemhan/TNI AL–Bakamla–Kemendagri–pemda pada tapak program. Yang tersedia hanyalah (i) pemetaan literatur yang memperlihatkan fragmentasi diskursif kajian KNMP dan kajian keamanan maritim berjalan paralel (kategori A dan B pada literature mapping); (ii) dokumen kebijakan KKP, termasuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, yang menata koordinasi pembangunan tetapi tidak merancang assemblage keamanan maritim; serta (iii) literatur tata kelola maritim yang menekankan karakter lintas-yurisdiksi (Bueger, 2015b; Bueger & Edmunds, 2024; Listiyono et al., 2022). Karena itu, tiga usulan berikut diturunkan dari inferensi kerangka, bukan dari evaluasi kelembagaan lapangan. Pertama, secara konseptual, kriteria lokasi KNMP dapat diperluas ke nilai strategis (ALKI, pulau terluar) apabila tujuan program hendak disambungkan ke dimensi *national security*; usulan ini bersandar pada wacana kebijakan perbatasan dan belum diuji sebagai prediktor efektivitas pengawasan. Kedua, secara konseptual, indikator kinerja dapat dilengkapi metrik *surveillance sipil*, kepatuhan lingkungan, dan ketahanan komunitas agar keempat kutub matriks terpantau; perluasan indikator ini merespons kekosongan data pada dimensi *marine environment* dan *national security* dalam korpus yang dianalisis, bukan bukti bahwa indikator lama telah gagal. Ketiga, formalisasi forum atau protokol KKP–Kemhan/TNI AL–Bakamla–Kemendagri–pemda tetap berstatus agenda normatif: ia logis sebagai terjemahan toolbox Bueger (berbagi informasi dan *capacity building*), tetapi tidak dapat diajukan sebagai solusi atas fragmentasi yang belum diukur di lokasi KNMP.

Dalam perspektif Bueger tentang *assemblage* tata kelola keamanan maritim yang kompleks (Bueger, 2015b; Bueger & Edmunds, 2024), KNMP secara konseptual dapat dibaca sebagai simpul yang berpotensi menghubungkan agenda pembangunan dengan agenda keamanan. Pembacaan itu adalah inferensi teoretis. *Evidence* yang dimiliki artikel hanya menunjukkan fragmentasi pada tingkat wacana dan desain indikator, bukan peta kewenangan operasional antarlembaga di tapak. Karena itu, desain sadar-matriks diajukan sebagai hipotesis tata kelola untuk diuji, bukan sebagai resep kelembagaan yang sudah terbukti mengurangi fragmentasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, analisis kebijakan normatif, dan data sekunder, artikel ini memetakan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke dalam *Maritime Security Matrix* Christian Bueger dan mengajukan inferensi konseptual bahwa program tersebut berpotensi menjadi salah satu pilar pendukung keamanan nasional apabila dipahami dan dikelola secara multidimensional. Temuan penelitian perlu dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, literatur dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa desain KNMP

secara resmi mencakup intervensi pada infrastruktur hulu-hilir, kelembagaan koperasi, dan pengembangan ekonomi biru. Kedua, data sekunder pada studi kasus Samber-Binyeri, berdasarkan laporan yang merujuk keterangan resmi KKP, mengaitkan intervensi KNMP dengan peningkatan pendapatan nelayan dan pengiriman hasil tangkapan. Ketiga, pemetaan pada dimensi *national security* dan *marine environment* merupakan inferensi konseptual yang bersifat proposisional dan kondisional serta belum diuji melalui penelitian lapangan.

Menjawab RQ1, KNMP secara konseptual dapat dipetakan ke dalam empat dimensi Maritime Security Matrix, dengan asosiasi indikator yang lebih terlihat pada dimensi economic development/blue economy dan human security berdasarkan data sekunder. Sebaliknya, *national security* dan *marine environment* belum dapat dinyatakan sebagai temuan empiris karena tidak didukung pengukuran primer. Menjawab RQ2, interdependensi antardimensi merupakan inferensi yang diturunkan dari kerangka Bueger, bukan hasil pengukuran lapangan. Penguatan economic development tanpa perhatian terhadap marine environment berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya melalui overfishing dan pada akhirnya melemahkan basis ekonomi serta *human security*. Sebaliknya, penguatan *national security* yang tidak disertai basis ekonomi dan ketahanan komunitas berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan sipil. Menjawab RQ3, kerangka integrasi empat dimensi yang diusulkan merupakan hasil analisis konseptual-normatif yang dapat digunakan sebagai rujukan awal dalam perancangan, pemantauan, dan evaluasi program, bukan bukti bahwa dampak terhadap keamanan nasional telah terukur.

Kontribusi teoretis penelitian terletak pada penerapan matriks Bueger untuk menganalisis KNMP. Kebaruan tersebut ditunjukkan melalui pemetaan terhadap 22 sumber dalam korpus literatur yang ditelusuri: 10 sumber membahas KNMP tanpa matriks Bueger (kategori A), 8 membahas Bueger tanpa KNMP (kategori B), 4 menyinggung nelayan/KNMP dan keamanan secara diskursif tanpa operasionalisasi empat dimensi (kategori C), dan tidak ditemukan sumber yang secara eksplisit mengintegrasikan KNMP ke dalam keempat dimensi matriks Bueger (kategori D). Dengan demikian, kerangka integrasi yang dihasilkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pembacaan KNMP sebagai program yang memiliki keterkaitan multidimensional dengan keamanan maritim. Secara praktis, kerangka tersebut dapat menjadi rujukan awal bagi perumus kebijakan dan pengelola program, dengan catatan bahwa validitasnya masih memerlukan pengujian melalui evaluasi empiris.

Keterbatasan utama penelitian terletak pada sifat konseptual-normatif yang berbasis literatur dan data sekunder, tanpa pengumpulan data empiris primer di lokasi KNMP. Secara khusus, hubungan antara peningkatan pendapatan nelayan dan berkurangnya rekrutmen ke jaringan kejahatan atau penyelundupan masih merupakan proposisi yang diturunkan dari logika kesejahteraan-kerentanan dan belum didukung bukti empiris langsung dari lokasi KNMP. Selain itu, dimensi marine environment belum dilengkapi indikator konkret, seperti kualitas lingkungan, stok ikan, *bycatch*, pencemaran, kepatuhan, atau metrik keberlanjutan, pada studi kasus Samber-Binyeri maupun sumber sekunder yang dianalisis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini melalui studi kasus empiris pada KNMP di wilayah perbatasan dan non-perbatasan, evaluasi kuantitatif hubungan indikator keempat dimensi, termasuk indikator lingkungan dan kepatuhan penangkapan, serta analisis tata kelola lintas lembaga dalam implementasi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Wekke, I. S. (2021). Keberadaan Komunitas Pelaut dan Pesisir di Papua Barat, Indonesia. Samudra Biru. <https://bacabuku.com/detail/keberadaan-komunitas-pelaut-dan-pesisir-di-papua-barat--indonesia/51372>
- Andriani, A. (2018). Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://bacabuku.com/detail/saya-indonesia--negara-maritim-jati-diri-negaraku/12742>
- Badan Informasi Geospasial. (2024). Pulau Indonesia bertambah jadi 17.380. <https://sipulau.big.go.id/news/11>
- Bueger, C. (2015a). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bueger, C. (2015b). Learning from piracy: Future challenges of maritime security governance. *Global Affairs*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.1080/23340460.2015.960170>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: A new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 93(6), 1293–1311. <https://doi.org/10.1093/ia/iix174>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2019). Maritime security: The uncharted politics of the global sea. *International Affairs*, 95(5), 971–978. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz145>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2024). Understanding maritime security. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197767146.001.0001>
- Bueger, C., Edmunds, T., & Stockbruegger, J. (2024). Securing the seas: A comprehensive assessment of global maritime security. United Nations Institute for Disarmament Research. https://unidir.org/wp-content/uploads/2024/11/Securing_the_seas_web-1.pdf
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner. https://www.riennner.com/title/Security_A_New_Framework_for_Analysis
- Dwiryanti, R. A. (2025). Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Filipina Terkait Ancaman *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi Pada Tahun 2019-2023 [PhD Thesis, Universitas Satya Negara Indonesia]. <https://repository.usni.ac.id/repository/6e626c079161b2d35fdc75941700cd5a.pdf>
- Firmawan, F., Masvika, H., Purwanto, P., Rahmahajuly, D., Widiyafi, M., & Prayoga, C. H. (2026). Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. *Jurnal pengabdian kolaboratif*, 4(2), 163–174. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jpko>
- Iriansyah, H. S. (2018). Manajemen Strategi Pengamanan Wilayah Nasional dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi Perbatasan NKRI. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 9(2), 1–16. <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/190>
- Jumadil. (2025). Peran transportasi laut dalam mendukung ekonomi global: Analisis arus perdagangan, konektivitas logistik, dan strategi keberlanjutan. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). Konektifitas pulau-pulau kecil dan terluar melalui pembangunan dermaga apung. <https://kkp.go.id/djpk/konektifitas-pulau-pulau-kecil-dan-terluar-melalui-pembangunan-dermaga-apung65fa488e9f4bb/detail.html>

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. <https://jdih.kkp.go.id>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025a). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I. <https://kkp.go.id>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025b). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. <https://kkp.go.id>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025c). KKP buktikan konsep Kampung Nelayan Merah Putih berkelanjutan (Siaran Pers Nomor SP.244/SJ.5/VI/2025). <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-buktikan-konsep-kampung-nelayan-merah-putih-berkelanjutan-Y7RA.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025d). KKP buktikan konsep Kampung Nelayan Merah Putih berkelanjutan (Siaran Pers Nomor SP.244/SJ.5/VI/2025, 13 Juni 2025). <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-buktikan-konsep-kampung-nelayan-merah-putih-berkelanjutan-Y7RA.html>
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2022). Strategi pertahanan laut dalam pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(2). <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3742>
- Nada, K., & Fadhillah, N. L. (2025). Pengawasan Pemerintah Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Di Wilayah Perairan Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), 365–380. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i2.22255>
- Nasruddin, N., Utomo, W., Muta'ali, L., Ritohardoyo, S., Suharyadi, S., & Poniman, A. (2013). Pembangunan pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan NKRI. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. https://www.researchgate.net/publication/350849272_Pembangunan_Pulau-Pulau_Kecil_Terluar_Sebagai_Beranda_Depan_NKRI
- Nofiasari, W., & Saputra, I. (2024). Strategi komunikasi literasi maritim kepada masyarakat untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. *Indonesian Maritime Journal*, 12(2), 64–82. <https://maritimejournal.id/index.php/jmi/article/view/96>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40701/uu-no-31-tahun-2004>
- Sahary, F. T., & Firdaus, N. (2026). Model Batalyon Teritorial Pembangunan untuk Meningkatkan Resiliensi Keamanan Maritim Nasional. *Journal Keamanan dan Keselamatan Maritim*, 2(1). <http://fkn.unhan.org/jkkm/article/view/110>
- Suwito, S. (2017). Geografi Kelautan. <http://repository.unikama.ac.id/4103/1/B1.%20Buku%20Geografi%20Kelautan.pdf>